Jurnal Abdimas Prakasa Dakara e-ISSN 2776-768X
https://doi.org/10.37640/japd.v6i2.2987 101-109

Penguatan *Civic Knowledge* dan *Civic Disposition* Berbasis Kesadaran Lingkungan Melalui Edukasi Sejarah di Museum Linggarjati

Sri Rahayu Pudjiastuti[1]*, Novian Bagaskoro[2], Asep Somala[3]
[1,2,3]Program studi Magister PPKn, STKIP Arrahmaniyah, Depok
*srirahayu@stkip-arrahmaniyah.ac.id

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini bertujuan memperkuat *civic knowledge* dan *civic disposition* berbasis kesadaran lingkungan melalui edukasi sejarah di Museum Linggarjati. Permasalahan yang diidentifikasi adalah masih dominannya pendekatan kognitif dalam pembelajaran PPKn, rendahnya integrasi kesadaran ekologis dalam pendidikan kewarganegaraan, serta minimnya pemanfaatan museum sebagai laboratorium kewargaan. Metode yang digunakan adalah partisipatif-reflektif dengan triangulasi metodologis (observasi kuantitatif dan wawancara kualitatif). Hasil menunjukkan peningkatan *civic knowledge* sebesar ±44%, peningkatan *civic disposition* sebesar ±36%, serta peningkatan kesadaran lingkungan sebesar ±35%. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi eksplorasi sejarah, refleksi nilai, dan aksi ekologis efektif membangun karakter kewargaan berkelanjutan. Model ini berkontribusi pada pengembangan konsep *Sustainable Civic Character* dalam kajian PPKn berbasis pengabdian masyarakat.

Kata kunci: *civic knowledge*, *civic disposition*, kesadaran lingkungan, museum.

Dikirim: 5 Juli 2026 Direvisi: 4 September 2026 Diterima: 29 Oktober 2026

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang berpengetahuan, berkarakter, dan partisipatif. Namun, praktik pembelajaran PPKn masih cenderung berorientasi pada aspek kognitif dan normatif sehingga kurang menyentuh dimensi disposisional dan praksis (Suwandi & Wahyudi, 2019). Kondisi ini berdampak pada kesenjangan antara pengetahuan kewargaan dan praktik sosial peserta didik. Di sisi lain, tantangan abad ke-21 menuntut integrasi kesadaran lingkungan dalam pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan berbasis lingkungan memperluas makna kewargaan sebagai tanggung jawab terhadap keberlanjutan (Maryani & Syamsudin, 2018). Namun, integrasi tersebut belum optimal dalam praktik pembelajaran kontekstual.

Tantangan abad ke-21 menuntut redefinisi kewarganegaraan yang tidak hanya berorientasi pada hak dan kewajiban politik, tetapi juga tanggung jawab ekologis. Maryani dan Syamsudin (2018) dalam *Jurnal Civics* menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan berbasis lingkungan efektif dalam membangun karakter peduli keberlanjutan. Namun, implementasinya masih parsial dan belum terstruktur dalam kurikulum maupun kegiatan pengabdian.

Penelitian Nurdin dan Hadi (2021) menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga situs sejarah berkorelasi dengan lemahnya kesadaran ekologis sebagai bagian dari identitas kewargaan. Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman nilai sejarah dan praktik tanggung jawab

Content from this work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

lingkungan. Dalam konteks tersebut, pendekatan *ecological citizenship* memperluas makna kewarganegaraan sebagai komitmen menjaga keberlanjutan lingkungan hidup (SR Pudjiastuti;2025). Edukasi sejarah di museum dapat menjadi medium untuk mengaitkan nilai perjuangan bangsa dengan tanggung jawab menjaga warisan sejarah dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, penguatan *civic knowledge* tidak berhenti pada aspek historis, tetapi berkembang menjadi kesadaran ekologis.

Secara global, pendidikan kewarganegaraan tidak lagi dipahami sebatas transmisi pengetahuan konstitusional, tetapi sebagai proses pembentukan warga negara yang reflektif, partisipatif, dan bertanggung jawab secara sosial (Banks, 2017). Namun, dalam praktiknya, pembelajaran kewarganegaraan sering kali terlalu berorientasi pada aspek kognitif dan kurang menyentuh dimensi disposisional (Suwandi & Wahyudi, 2019).

Westheimer dan Kahne (2004) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus mendorong terbentuknya *personally responsible citizen*, *participatory citizen*, dan *justice-oriented citizen*. Model ini menuntut adanya pengalaman langsung dan keterlibatan sosial agar pengetahuan berubah menjadi tindakan. Selain itu, perkembangan isu keberlanjutan global menuntut integrasi konsep *ecological citizenship*, yaitu tanggung jawab warga negara terhadap lingkungan sebagai bagian dari praktik demokrasi (Dobson, 2007). Konsep ini sejalan dengan pengembangan pendidikan kewarganegaraan berbasis lingkungan (Maryani & Syamsudin, 2018).

Museum sebagai ruang publik memiliki potensi pedagogis yang signifikan. Menurut Hooper-Greenhill (2007), museum modern berfungsi sebagai *learning space* yang memungkinkan pembelajaran reflektif dan partisipatif. Dalam konteks ini, Museum Linggarjati menjadi ruang kontekstual untuk mengintegrasikan kesadaran sejarah dan kesadaran ekologis. Sebagai situs bersejarah tempat Perundingan Indonesia–Belanda tahun 1946, Museum Linggarjati memiliki nilai edukatif tinggi. Museum tidak hanya menjadi simbol diplomasi, tetapi juga ruang pembelajaran kontekstual yang dapat membangun kesadaran historis dan ekologis secara simultan. Museum sebagai sumber pembelajaran kontekstual terbukti mampu memperkuat pemahaman nilai kebangsaan (Winarno, 2020). Berdasarkan latar belakang tersebut, pengabdian ini bertujuan: 1) Memperkuat *civic knowledge* melalui edukasi sejarah kontekstual. 2) Mengembangkan *civic disposition* melalui refleksi dan aksi partisipatif. 3) Mengintegrasikan kesadaran lingkungan sebagai praktik kewargaan berkelanjutan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa museum memiliki potensi besar sebagai sumber pembelajaran kontekstual dalam PPKn (Winarno, 2020). Namun, pemanfaatannya masih sebatas sumber belajar tambahan dan belum diintegrasikan dalam model pengabdian masyarakat berbasis karakter. Pengabdian ini menghadirkan reposisi museum sebagai **laboratorium kewarganegaraan (civic laboratory).** Artinya, museum tidak hanya menjadi ruang representasi sejarah, tetapi juga ruang praktik kewargaan melalui aksi nyata pelestarian lingkungan. Temuan Nurdin dan Hadi (2021) menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga situs sejarah berkaitan dengan kurangnya integrasi antara edukasi nilai dan praktik sosial. Model pengabdian ini menjawab kesenjangan tersebut dengan melibatkan mahasiswa dan masyarakat dalam kegiatan reflektif dan aksi kolektif. Kebaruan praksis ini memperlihatkan

transformasi fungsi pengabdian masyarakat dari sekadar sosialisasi nilai menjadi ruang pemberdayaan sosial yang berorientasi pada perubahan perilaku kewargaan.

Secara integratif, program ini memperkenalkan gagasan *sustainable civic character*, yaitu karakter kewargaan yang tidak hanya berlandaskan nasionalisme historis, tetapi juga tanggung jawab ekologis berkelanjutan. Konsep ini menjembatani kesenjangan antara dimensi historis kewargaan dan tantangan global kontemporer. Suwandi dan Wahyudi (2019) menegaskan bahwa penguatan karakter dalam PPKn akan efektif apabila berbasis pengalaman sosial yang konkret. Oleh karena itu, integrasi edukasi sejarah dan aksi ekologis dalam pengabdian ini menjadi kontribusi konseptual yang memperluas paradigma pendidikan kewarganegaraan menuju model yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, kebaruan pengabdian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Mengintegrasikan edukasi sejarah, *civic education*, dan *ecological citizenship* dalam satu model pembelajaran kontekstual. 2) Mengembangkan pendekatan *Civic-Ecological Experiential Engagement* berbasis pengalaman langsung di museum. 3) Mereposisi museum sebagai *civic laboratory* dalam penguatan karakter kewarganegaraan. 4) Menghasilkan konsep *Sustainable Civic Character* sebagai kontribusi konseptual bagi pengembangan PPKn berbasis pengabdian masyarakat. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya bersifat implementatif, tetapi juga memiliki kontribusi teoritis dan model praksis yang dapat direplikasi pada situs sejarah lainnya.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan *partisipatif-reflektif berbasis experiential civic learning* yang mengintegrasikan edukasi sejarah dan kesadaran lingkungan dalam penguatan *civic knowledge* dan *civic disposition*. Model ini dirancang untuk menjawab permasalahan dominannya pendekatan kognitif dalam pembelajaran PPKn serta rendahnya internalisasi nilai kewargaan dalam praktik sosial (Suwandi & Wahyudi, 2019). Kegiatan dilaksanakan di Museum Linggarjati dengan melibatkan mahasiswa Magister PPKn, pengelola museum, dan masyarakat sekitar sebagai subjek partisipatif. Metode pengabdian menggunakan pendekatan *Community Engagement berbasis Experiential Civic Learning*, yaitu model pembelajaran kewarganegaraan yang menekankan pengalaman langsung, refleksi nilai, dan aksi partisipatif (Rahmat & Sapriya, 2022). Pendekatan ini relevan karena pembelajaran berbasis pengalaman terbukti lebih efektif dalam membangun *civic disposition* dibanding metode ceramah konvensional.

Kerangka Pertama adalah melalui Pembelajaran kontekstual berbasis museum menempatkan situs sejarah sebagai sumber belajar autentik yang memungkinkan peserta berinteraksi langsung dengan artefak, ruang, dan narasi sejarah. Winarno (2020) menegaskan bahwa museum dalam pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai media kontekstual yang memperkaya pemahaman nilai kebangsaan melalui pengalaman nyata, bukan sekadar transfer informasi di ruang kelas. Secara operasional, pendekatan ini diwujudkan melalui: 1) Eksplorasi koleksi dan ruang historis**,** di mana peserta mengamati langsung ruang perundingan, dokumentasi, dan simbol diplomasi. 2) Pemaparan nilai historis, yang tidak hanya menjelaskan kronologi Perundingan Linggarjati, tetapi juga mengangkat nilai kompromi,

persatuan, dan tanggung jawab kolektif. 3) Refleksi terarah, yang mengaitkan peristiwa sejarah dengan praktik kewargaan kontemporer. Melalui tahapan tersebut, peserta membangun *civic knowledge* secara reflektif. Pengetahuan tidak berhenti pada fakta historis, tetapi berkembang menjadi pemahaman nilai yang relevan dengan kehidupan sosial masa kini.

Kerangka kedua adalah pendidikan kewarganegaraan berbasis lingkungan. Maryani dan Syamsudin (2018) menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan perlu memperluas makna kewargaan dari relasi warga–negara menjadi relasi warga–lingkungan. Dengan demikian, tanggung jawab ekologis menjadi bagian integral dari identitas kewargaan. Dalam desain kegiatan, integrasi ini dilakukan melalui: 1) Diskusi tentang keterkaitan sejarah dan keberlanjutan**,** yakni bagaimana pelestarian situs sejarah memerlukan kesadaran ekologis. 2) Internalisasi nilai tanggung jawab lingkungan**,** dengan menekankan bahwa menjaga kebersihan dan kelestarian museum adalah bentuk penghormatan terhadap perjuangan bangsa. 3) Aksi ekologis partisipatif**,** seperti kegiatan bersih lingkungan di area museum. Pendekatan ini mendorong terbentuknya kesadaran bahwa nasionalisme tidak hanya diwujudkan melalui simbol dan retorika, tetapi juga melalui tindakan konkret menjaga ruang publik dan lingkungan.

Kerangka ketiga adalah partisipasi sosial dalam pelestarian situs sejarah. Nurdin dan Hadi (2021) menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelestarian situs sejarah memperkuat karakter kewarganegaraan, terutama dalam dimensi tanggung jawab sosial dan rasa memiliki. Secara operasional, desain kegiatan menciptakan ruang partisipatif melalui: 1) Keterlibatan aktif peserta dalam diskusi reflektif**,** bukan sebagai pendengar pasif. 2) Kolaborasi dengan pengelola museum**,** sehingga kegiatan memiliki dampak nyata pada lingkungan sekitar. 3) Aksi kolektif**,** yang menumbuhkan solidaritas dan identitas kewargaan berbasis komunitas. Melalui mekanisme ini, *civic disposition* berkembang secara praksis. Peserta tidak hanya memahami nilai tanggung jawab sosial, tetapi mengalaminya secara langsung melalui tindakan kolektif.

Secara integratif, ketiga pendekatan tersebut saling melengkapi: 1) Pembelajaran kontekstual memperkuat *civic knowledge*. 2) Pendidikan kewarganegaraan berbasis lingkungan memperluas orientasi kewargaan menuju keberlanjutan. 3) Partisipasi sosial mengaktualisasikan *civic disposition* dalam tindakan nyata. Desain ini menghasilkan model pembelajaran berbasis pengalaman yang menghubungkan dimensi kognitif, afektif, dan perilaku secara simultan. Dengan demikian, museum tidak hanya berfungsi sebagai ruang edukasi sejarah, tetapi sebagai laboratorium kewarganegaraan yang menumbuhkan karakter kewargaan berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan bahwa pengabdian tidak hanya bersifat sosialisasi, tetapi menjadi proses transformasi sosial berbasis nilai kewargaan dan tanggung jawab ekologis.

Tahapan Pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahap utama berikut:

Tahap I Persiapan dan Analisis Kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan: 1) Koordinasi dengan pengelola Museum Linggarjati. 2) Observasi kondisi lingkungan dan pola kunjungan edukatif. 3) Identifikasi tingkat pemahaman awal peserta terkait nilai sejarah dan kesadaran lingkungan. Analisis kebutuhan penting

dilakukan untuk memastikan program sesuai dengan konteks sosial masyarakat (Nurdin & Hadi, 2021).

Tahap II Implementasi Edukasi Sejarah Kontekstual. Peserta mengikuti kegiatan *historical immersion* berupa: 1) Eksplorasi ruang dan artefak museum, 2) Penjelasan tentang Perundingan Linggarjati, 3) Diskusi mengenai nilai diplomasi, nasionalisme, dan tanggung jawab kolektif. Pendekatan ini sejalan dengan konsep museum sebagai sumber pembelajaran kontekstual yang efektif dalam PPKn (Winarno, 2020). Tujuan tahap ini adalah memperkuat *civic knowledge* peserta melalui pengalaman langsung.

Tahap III Refleksi dan Internaliasi Nilai Kewargaan. Setelah eksplorasi, peserta mengikuti diskusi reflektif yang mengaitkan nilai sejarah dengan isu kontemporer, khususnya keberlanjutan lingkungan. Refleksi dilakukan melalui: 1) Diskusi kelompok terarah (FGD), 2) Analisis kasus pelestarian lingkungan situs sejarah, 3) Penyusunan komitmen kewargaan berbasis kesadaran ekologis. Model reflektif ini penting dalam membangun *civic disposition*, karena internalisasi nilai terjadi melalui proses kesadaran kritis dan dialog partisipatif (Rahmat & Sapriya, 2022).

Tahap IV Aksi Partisipatif Peduli Lingkungan. Tahap akhir berupa aksi nyata berupa: 1) Gerakan kebersihan kawasan museum, 2) Edukasi pengunjung mengenai pentingnya pelestarian lingkungan, 3) Deklarasi komitmen bersama menjaga situs sejarah. Tahap ini merupakan implementasi pendidikan kewarganegaraan berbasis lingkungan sebagaimana ditegaskan Maryani dan Syamsudin (2018), bahwa kesadaran ekologis harus diwujudkan dalam praktik sosial nyata. Kegiatan aksi partisipatif juga memperkuat identitas kewargaan melalui keterlibatan langsung masyarakat dalam pelestarian situs sejarah (Nurdin & Hadi, 2021).

Teknik Evaluasi dan Indikator Keberhasilan. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui: 1) Wawancara untuk mengukur peningkatan *civic knowledge*. 2) Observasi sikap partisipatif selama kegiatan berlangsung. 3) Refleksi peserta untuk mengidentifikasi perubahan *civic disposition*. Indikator keberhasilan mencakup: 1) Peningkatan pemahaman nilai sejarah dan tanggung jawab kewargaan. 2) Meningkatnya partisipasi aktif dalam aksi pelestarian lingkungan. 3) Terbentuknya komitmen kolektif menjaga keberlanjutan situs sejarah. Model evaluasi ini selaras dengan pendekatan pendidikan karakter berbasis pengalaman sosial (Suwandi & Wahyudi, 2019).

Secara konseptual, metode pelaksanaan ini membentuk alur:

Eksplorasi Sejarah → Refleksi Nilai → Kontekstualisasi Lingkungan → Aksi Partisipatif → Evaluasi Karakter Kewargaan

Model ini menunjukkan integrasi antara dimensi kognitif (*civic knowledge*) dan afektif-praksis (*civic disposition*) dalam satu kesatuan proses pengabdian masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan *Civic Knowledge*

Hasil observasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta dari 43% menjadi 87% (kenaikan ±44%). Wawancara mengungkap bahwa peserta mulai memahami makna diplomasi dan tanggung jawab kolektif secara reflektif. Temuan ini sejalan dengan pembelajaran kontekstual berbasis museum yang efektif membangun pemaknaan nilai kebangsaan (Winarno, 2020). Pendekatan *experiential civic learning* memperkuat konstruksi pengetahuan melalui pengalaman langsung dan refleksi (Rahmat & Sapriya, 2022). Peningkatan *civic knowledge* sebesar ±44% menunjukkan efektivitas pembelajaran berbasis pengalaman. Temuan ini sejalan dengan teori *experiential learning* (Kolb, 1984) yang menyatakan bahwa pengetahuan terbentuk melalui siklus pengalaman konkret, refleksi, konseptualisasi, dan eksperimen aktif.

Rahmat dan Sapriya (2022) menunjukkan bahwa *experiential civic learning* meningkatkan pemahaman reflektif peserta didik. Secara internasional, Torney-Purta et al. (2015) dalam studi ICCS menegaskan bahwa keterlibatan aktif dalam pembelajaran kewarganegaraan berkorelasi dengan peningkatan literasi kewargaan dan komitmen demokratis. Dengan demikian, museum sebagai ruang pengalaman historis memperkuat konstruksi *civic knowledge* yang tidak sekadar informatif, tetapi transformasional.

Konsistensi antara data observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman di museum efektif dalam membangun pemahaman reflektif. Hal ini sejalan dengan temuan Winarno (2020) yang menyatakan bahwa museum sebagai sumber pembelajaran kontekstual mampu memperdalam pemaknaan nilai kebangsaan. Dengan demikian, peningkatan pada aspek *civic knowledge* bukan hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga transformasional.

Penguatan *Civic Disposition*

Partisipasi aktif meningkat dari 52% menjadi 88% (kenaikan ±36%). Peserta menunjukkan rasa memiliki dan tanggung jawab sosial terhadap situs sejarah. Hasil ini mendukung pandangan bahwa karakter kewargaan berkembang melalui pengalaman sosial konkret (Suwandi & Wahyudi, 2019). Partisipasi dalam pelestarian situs sejarah memperkuat identitas kewargaan (Nurdin & Hadi, 2021). Peningkatan partisipasi sebesar ±36% menunjukkan berkembangnya *civic disposition*. Westheimer dan Kahne (2004) menekankan bahwa kewarganegaraan partisipatif terbentuk melalui pengalaman nyata dalam tindakan sosial. Temuan ini juga didukung oleh Print (2013), yang menyatakan bahwa keterlibatan dalam kegiatan komunitas memperkuat identitas kewargaan dan komitmen partisipatif jangka panjang. Secara nasional, Nurdin dan Hadi (2021) menunjukkan bahwa partisipasi dalam pelestarian situs sejarah memperkuat karakter kewargaan. Aksi ekologis dalam pengabdian ini menjadi medium internalisasi nilai yang menghubungkan dimensi kognitif dan disposisional secara simultan (F Susantina, SR Pudjiastuti & Muh Rais; 2026).

Wawancara memperkuat hasil tersebut. Informan menyatakan munculnya rasa memiliki terhadap situs sejarah dan kesadaran bahwa menjaga kebersihan museum adalah bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara. Pengalaman terlibat langsung dalam aksi kebersihan memberi dampak emosional yang memperkuat komitmen moral mereka. Secara teoretis, temuan ini mendukung pandangan Rahmat dan Sapriya (2022) yang juga menegaskan bahwa *civic disposition* berkembang optimal ketika peserta terlibat dalam praktik reflektif dan partisipatif. Dengan demikian, integrasi refleksi nilai dan aksi sosial terbukti efektif menjembatani kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan kewargaan.

Integrasi Kesadaran Lingkungan Sebagai Praktik Kewargaan

Hasil observasi menunjukkan bahwa 82% peserta memahami pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab kewargaan, 86% menyatakan pentingnya integrasi sejarah dan keberlanjutan, serta 80% berkomitmen menerapkan perilaku peduli lingkungan di luar kegiatan. Secara rata-rata, terjadi peningkatan kesadaran ekologis sebesar ±35%.

Peserta menyadari bahwa menjaga lingkungan museum adalah bentuk penghormatan terhadap sejarah bangsa. Temuan ini menguatkan konsep pendidikan kewarganegaraan berbasis lingkungan sebagai perluasan makna kewargaan menuju keberlanjutan (Maryani & Syamsudin, 2018). Peningkatan kesadaran lingkungan sebesar ±35% menunjukkan integrasi nilai sejarah dan tanggung jawab ekologis. Dalam perspektif global, Dobson (2007) menjelaskan bahwa *ecological citizenship* menuntut tanggung jawab moral terhadap keberlanjutan, melampaui batas formal kewarganegaraan. Stevenson et al. (2017) juga menegaskan bahwa pendidikan lingkungan yang terintegrasi dalam pendidikan kewarganegaraan mendorong pembentukan warga negara yang berorientasi keberlanjutan, SR Pudjiastuti (2024) memiliki pandangan serupa.

Wawancara menunjukkan bahwa sebelumnya peserta belum mengaitkan pelestarian lingkungan dengan nilai sejarah. Setelah mengikuti kegiatan, mereka menyadari bahwa menjaga lingkungan museum merupakan bentuk penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Kesadaran ini menunjukkan adanya integrasi antara dimensi historis dan ekologis dalam praktik kewargaan.

Temuan pengabdian ini memperkuat konsep tersebut dengan menunjukkan bahwa kesadaran ekologis dapat ditanamkan melalui pendekatan historis dan reflektif. Museum menjadi ruang simbolik yang menghubungkan nasionalisme historis dengan tanggung jawab lingkungan masa kini. Secara konseptual, pengabdian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperluas paradigma pendidikan kewarganegaraan berbasis pengalaman menuju orientasi keberlanjutan.

Data observasi dan wawancara menunjukkan konsistensi pada ketiga dimensi. Tidak terdapat kontradiksi signifikan antara temuan kuantitatif dan kualitatif. Hal ini memperkuat validitas bahwa integrasi edukasi sejarah, refleksi nilai, dan aksi ekologis efektif dalam membangun karakter kewargaan berkelanjutan.

Triangulasi metodologis menunjukkan konsistensi antara data kuantitatif dan kualitatif pada ketiga dimensi yang diteliti. Peningkatan persentase pada observasi didukung oleh narasi perubahan persepsi dan sikap dalam wawancara. Tidak ditemukan kontradiksi signifikan antara kedua sumber data, sehingga validitas temuan semakin kuat.

Secara deskriptif, pengabdian ini berhasil mengintegrasikan: 1) Penguatan *civic knowledge* melalui pembelajaran kontekstual di museum, 2) Penguatan *civic disposition* melalui refleksi dan aksi sosial, 3) Pengembangan kesadaran lingkungan sebagai praktik kewargaan berkelanjutan.

Dengan demikian, museum berfungsi sebagai laboratorium kewarganegaraan yang memungkinkan transformasi dari pengetahuan normatif menuju karakter kewargaan yang partisipatif dan ekologis. Model ini menjawab problem pembelajaran PPKn yang terlalu kognitif dan kurang praksis sebagaimana dikemukakan Suwandi dan Wahyudi (2019), sekaligus memperluas paradigma pendidikan kewarganegaraan berbasis pengalaman dan keberlanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dianalisis melalui triangulasi metodologis, pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Museum Linggarjati menunjukkan efektivitas dalam memperkuat *civic knowledge*, *civic disposition*, dan kesadaran lingkungan peserta. Pada dimensi *civic knowledge*, terjadi peningkatan pemahaman sebesar ±44% setelah peserta mengikuti eksplorasi sejarah dan diskusi reflektif. Peserta tidak lagi memaknai Perundingan Linggarjati sekadar sebagai peristiwa historis, tetapi sebagai representasi nilai diplomasi, persatuan, dan tanggung jawab kolektif. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa pembelajaran kontekstual berbasis museum efektif dalam memperdalam pemaknaan nilai kebangsaan (Winarno, 2020).

Pada dimensi *civic disposition*, terjadi peningkatan partisipasi aktif sebesar ±36%, yang tercermin dalam keterlibatan diskusi reflektif dan aksi peduli lingkungan. Pengalaman langsung dan refleksi nilai terbukti mampu membangun komitmen moral dan rasa tanggung jawab sosial, sebagaimana ditegaskan dalam konsep *experiential civic learning* (Rahmat & Sapriya, 2022). Hal ini juga menjawab permasalahan dominannya pendekatan kognitif dalam PPKn yang belum sepenuhnya menyentuh dimensi disposisional (Suwandi & Wahyudi, 2019).

Pada aspek kesadaran lingkungan, terjadi peningkatan rata-rata ±35%, yang menunjukkan berkembangnya integrasi antara kesadaran historis dan tanggung jawab ekologis. Peserta mulai memaknai pelestarian lingkungan situs sejarah sebagai bagian dari identitas kewargaan. Temuan ini sejalan dengan konsep pendidikan kewarganegaraan berbasis lingkungan yang menekankan perluasan makna kewargaan menuju keberlanjutan (Maryani & Syamsudin, 2018). Partisipasi aktif dalam pelestarian situs sejarah juga memperkuat identitas kewargaan berbasis komunitas (Nurdin & Hadi, 2021).

Secara keseluruhan, pengabdian ini berhasil menjembatani kesenjangan antara *civic knowledge* dan *civic disposition* melalui integrasi edukasi sejarah,

refleksi nilai, dan aksi ekologis. Museum berfungsi sebagai laboratorium kewarganegaraan (*civic laboratory*) yang memungkinkan transformasi dari pemahaman normatif menuju praktik kewargaan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Banks, J. A. (2017). *Citizenship education and global migration*. American Educational Research Journal.

Dobson, A. (2007). Environmental citizenship: Towards sustainable development. *Sustainable Development*, 15(5), 276–285.

Farida Susantina, Sri Rahayu Pudjiastuti & Muh Rais (2026), "Development of A Green Education Based Horticulture Learning Model To Improve Students' Environmental Awareness", *JHSS (Jurnal Ilmu Humaniora dan Studi Sosial), 10(2), 1017-1023.*

Hooper-Greenhill, E. (2007). *Museums and education: Purpose, pedagogy, performance*. Routledge.

Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice Hall.

Maryani, E., & Syamsudin, H. (2018). Pengembangan pendidikan kewarganegaraan berbasis lingkungan dalam membangun karakter warga negara. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(2), 123–134.

Nurdin, E., & Hadi, S. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan situs sejarah sebagai penguatan karakter kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 45–56.

Print, M. (2013). Competencies for democratic citizenship and participation. *European Journal of Education*, 48(3), 356–369.

Rahmat, R., & Sapriya, S. (2022). Experiential civic learning dalam penguatan civic disposition peserta didik. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(2), 215–230.

Sri Rahayu Pudjiastuti (2025), *Etika Islam Dalam Menjaga Lingkungan Hidup,* Penerbit Widina.

Sri Rahayu Pudjiastuti dan Lutfi Hardianto (2024), "Ecological Citizenship Based on green Constitution Through Environmental Education", *Jurnal Pendidikan Lingkungan Hidup (JIP) STKIP, 16(1), 132-140.*

Stevenson, R. B., et al. (2017). Environmental citizenship and education for sustainability. *Environmental Education Research*, 23(3), 351–368.

Suwandi, A., & Wahyudi, W. (2019). Implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran PPKn di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 89–100.

Torney-Purta, J., et al. (2015). Civic knowledge, engagement, and attitudes among adolescents. *International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) Studies*.

Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). What kind of citizen? The politics of educating for democracy. *American Educational Research Journal*, 41(2), 237–269.

Winarno, W. (2020). Museum sebagai sumber pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(1), 1–12.